

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Cet.1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang MK dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi PemiluRI, Jakarta, 2020

Adnan Buyung Nasution, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Penjelasan dan Analisis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokrasi, Edisi II*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011

Benny K. Harman, *Mempertimbangkan MK: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013

Bernhard Sutor, *Demokratie: Grundlagen, Formen, Perspektiven*, Ferdinand Schöningh, Paderborn, Jerman, 2000

Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan MK di Indonesia*, Bandung, 2004

F. Sugeng Istanto, *Politik Hukum*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005

Feri Amsari dan Charles Simabura, *Menyoal Keadilan Pemilu: Kajian atas Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 dan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021

Firman Nurhadi, *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, Rajawali Pers, Depok, 2019

F.X. Mudji Sutrisno dan St. Sunardi, *Keadilan dan Demokrasi: Pergulatan dalam Sistem Politik Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2017

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Hukum Acara MK*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018

Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, 1962.

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara MK*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021

Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional MK: Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa*

Mendatang, beserta Pendapat Hukum dalam Putusan MK Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi, CV Kekata Group, Surakarta, 2020

Jack Lively, *Democracy*, Basil Blackwell, Oxford, 1975

Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012

Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social (Kontrak Sosial)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2014

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi: Sitem Presidensial dan MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy (edisi terjemahan Indonesia)*, Jakarta

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hukum dan Peradilan di Indonesia*, ed. Ramlan Surbakti, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta Pusat, 2014
- Leo Agustino, *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3. Mengutip Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in Post Communist Europe*, 2002
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Muchammad Ali Safa'at, *Hukum Acara MK*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2011
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, Cet.1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), *Tantangan dan Masa Depan Demokrasi Elektoral Indonesia* (seringkali merupakan kompilasi esai atau analisis), Jakarta, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Hukum Acara MK, Cet. Pertama*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society, Cet. 1*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dkk, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008

Soimin dan Mashuriyanto, *MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013

Solly Lubis, *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2007

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Demokrasi Lokal: Potret, Masalah, dan Agenda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Tim Penyusun, *Hukum Acara MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010

Topo Santoso, *Hukum & Proses Demokrasi (Problematisasi Sepuluh Pemilu dan Pemilukada)*, Kemitraan, Jakarta, 2007

Thomas Hobbes, *Leviathan (edisi terjemahan Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

B. Makalah/Jurnal Ilmiah

Adrianus Bawamenewi, “Wewenang MK Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara”, *Jurnal Warta Edisi* 63 14, No. 1 Januari 2020

Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia”, *Jurnal Sasi* 26, No. 4 Oktober-Desember 2020

Herdianto H. Lalenoh, “Kewenangan MK Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau dari Pasal 24 C ayat UUD 1945”, *Jurnal Lex Administratum* 6, No. 4 September-Desember 2018

Abdurachman Satrio, “Kewenangan MK Dalam Memutus Hasil Perselisihan Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics”, *Jurnal Konstitusi* 12, No. 1 Maret 2019

Giovanni Cornelia, dkk., “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 2024

Adrianus Meliala, “Pemilukada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 1 April 2018

Mutiara Hikmah, “MK dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, No. 2 April-Juni 2005

Suhartini, “Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)”, *Jurnal De Jure* 11, No. 1 April 2019

Galuh Candra Purnamasari, “Kewenangan MK Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 Oktober 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 (lima) tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilu Nomor 15 (lima) tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

D. Internet

Sejarah Pemilu Republik Indonesia

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fritz-ada-tiga-jenis-masalah-penyebab-putusan-mk-terkait-psu>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566& menu=2>

Hukum Online.Com, "Wewenang MK dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilukada", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6843/lembaga-yang-berwenang-menangani-sengketa-hasil-Pemilukada>

